

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adnani, A. (2021). *Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka.
- Ali, Z. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arliman, L. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. (2014). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, J. W. (2002). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Hikmahanto Juwana. (2017). *Hukum Internasional: Perspektif Indonesia*. Universitas Indonesia (UI-Press).
- Maulida Nurhidayati, dkk. (2022) *Ekonomi dan bisnis: Percikan Pemikiran Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Maria S.W. Sumardjono. (2020). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Kencana.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Neuman, W. L. (2013). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches*. Pearson.
- Nurhayati, Y. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media
- Philipus M. Hadjon. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Kencana.
- Purwati, P. D., Yuniarizki, S. G., Vita, I. A. Y., Putri, D. R., Nurfahada, A., Hanif, N. K., ... & Nashikhah, M. (2023). *Desain Techno Preneur Guru di Era Digital: Bunga Rampai*. Cahya Ghani Recovery.
- Satjipto Rahardjo. (2015). *Hukum dan Perilaku*. Kompas.
- Soerjono Soekanto. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Statistik Daerah. (2019). *Dinas Statistik Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019*. Singaraja: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng.

- Sulistiyowati Irianto. (2019). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Kompas.
- Sunarso, H. S., & SH, M. (2023). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Tim Prima Pena. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gita Media Press.
- Taswem, Tarib. (2011). *Peraturan Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Indonesia Future Institute.
- Winardi. (1999). *Pengantar Manajemen Penjualan*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Windari, R. A., & SH, M. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.

Jurnal

- Adiyanta, F. S. (2019). Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697-709.
- Agustina, Ika. (2022). "Keterkaitan Hukum Administrasi dan Kebijakan Publik Terhadap Ketertiban Umum di Kota X." *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan*, Vol. 5, No. 1, pp. 88-97.
- Arifin, A. (2020). Efektivitas Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabut Asap di Kota Pontianak. *JPASDEV: Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 1(2), 189-208.
- Aulia, R., & Kusumaningsih, R. (2021). Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelaku Usaha Rumah Makan yang Melanggar Protokol Kesehatan dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Kota Serang. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(2).
- Badar, M., Sulaksono, A., & Sasongko, H. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 4(2), 38-44.
- Barlian, A. E. A. (2016). Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan dalam Prespektif Politik Hukum. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 605-622.
- Desthiani, U. (2019). Peran Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Memberikan Pembinaan Kepada Pedagang Kaki Lima (Pkl). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sekretari/Administrasi Perkantoran*, 6(2), 1-17.
- Hasrul, M. (2017). Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah. *Amanna Gappa*, 60-69

- Layuck, K. M. (2020). Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Menurut UU Nomor 9 Tahun 2015. *LEX ADMINISTRATUM*, 8(3).
- Mertada, G. R., & Mandala, S. (2016). Penerapan Ketertiban Umum Khususnya Ketertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Di Kota Singaraja. *Kertha Widya*, 4(2).
- Purnawan, K., & Surata, I. N. (2015). Peranan Polisi Pamong Praja Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, 3(2).
- Putra, Rizki Permata Sari, et al. (2023). "Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum di Daerah Y." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 35, No. 1, pp. 50-65.
- Rahardjo, Mahfud, et al. (2021). "Kebijakan Hukum Pidana dalam Mengatasi Kejahatan di Indonesia." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Vol. 6, No. 2, pp. 122-134.
- Setiono, G. C. (2018). Aspek yuridis alih fungsi trotoar jalan sebagai lokasi pedagang kaki lima. *Transparansi Hukum*, 1(2).
- Sidik, M. (2002). Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung, 10.
- Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum, Al-Razi. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 2.
- DM, M. Y., Sugianto, S., Pangaribuan, R. L., Utama, A. W. P., & Saragih, G. M. (2022). Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat. *Jurnal Pendidik Indonesia (JPIIn)*, 5(2), 176-184.
- Suhariningsih, et al. (2019). "Analisis Yuridis Kebijakan Publik dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 19, No. 3, pp. 300-310.
- Sujatna, Y. (2018). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 3(2), 307-314.
- Suprayetno, R. (2017). Kewenangan antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4), 209949.
- Syahputra, R. (2019). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Memelihara Ketertiban Umum Di Kota Pekanbaru. *Economic and Business Management International Journal (EABMIJ)*, 1(01), 1-10.

Wahyono, S. (2020). Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. *Jurnal Yustitia*, 20(2).

Wahyuni, Sri. (2020). "Peran Penegak Hukum dalam Mengatasi Pelanggaran Hukum di Sektor Publik." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9, No. 1, pp. 15-25.

Karya tulis Ilmiah

Adibah Amintasria Lasahido, Ermaya Suradinata Sampara Lukman (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat

Hasan, M. (2018). Dampak ekonomi atas implementasi peraturan daerah terhadap relokasi usaha warung tenda di kawasan Yos Sudarso Palangka Raya (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).

Lima, P. P. K., & Sari, Y. N. (2014). Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Rosadi, I. T. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (Studi Pegawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Kuantan Singingi) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Rahayu, S. (2022). Fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Dalam Penyusunan Produk Hukum Di Kabupaten Ponorogo (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Rahim, A. A. (2022). Tanggung Jawab Bupati dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).

Ullynta, M. H. (2022). Efektivitas Penerapan Pasal 30 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Di Pkor Way Halim Bandar Lampung) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Penegakan Peraturan Daerah Polisi Pamong Praja

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33).

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 336).

Peraturan Daerah Buleleng Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tertuang dalam (Lembaran daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2008) .

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2009).

